

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Pemerintah Daerah selaku subyek pelaksana jalannya pemerintahan daerah selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan pembangunan. Setiap permasalahan yang terdapat di daerah tentunya juga memiliki implikasi tersendiri terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dengan banyaknya permasalahan yang ada, pemerintah daerah harus memiliki prioritas pembangunan guna mengatasi segala permasalahan yang ada di daerah. Prioritas ini bertujuan untuk dapat mengetahui permasalahan mana yang lebih besar implikasinya terhadap pembangunan suatu daerah. Selain itu, prioritas juga berfungsi untuk memaksimalkan pendanaan yang terbatas di daerah.

Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya unkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Untuk lebih jelasnya Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (performance maintenance).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya unkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategic, pengelolaan kinerja

menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo pada tahun-tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2017 serta isu-isu strategis pembangunan baik di tingkat nasional maupun provinsi, maka perumusan prioritas pembangunan tahun 2018 dilakukan dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2014-2019. Disamping itu guna menjamin konsistensi dengan perencanaan pembangunan tingkat nasional dan provinsi Jawa Timur, maka penyusunan prioritas ini juga mengacu pada prioritas yang tercantum pada RKP 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Pada tataran pemerintah pusat, visi pembangunan nasional 2015 – 2019 adalah **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"**, dengan misi sebagai berikut :

1. *Mewujudkan* keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopangkemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. *Mewujudkan* masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. *Mewujudkan* politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. *Mewujudkan* kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. *Mewujudkan* bangsa yang berdaya saing.
6. *Mewujudkan* Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. *Mewujudkan* masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, maka ditetapkan agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk **melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman** pada seluruh WN;

2. Membangun **tata kelola Pemerintahan** yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. **Membangun Indonesia dari pinggiran** dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan **reformasi sistem dan penegakan hukum** yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan **kualitas hidup manusia dan masyarakat** Indonesia
6. Meningkatkan **produktivitas rakyat dan daya saing** di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan **sektor-sektor strategis** ekonomi domestik
8. Melakukan **revolusi karakter bangsa**
9. Memperteguh **kebhinekaan** dan memperkuat restorasi sosial

Sedangkan tema pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2018 adalah **"Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"**, dengan prioritas sebagai berikut :

I. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan kualitas guru

II. KESEHATAN

3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaiki Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

V. KETAHANAN ENERGI

13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

VI. KETAHANAN PANGAN

15. Peningkatan Produksi pangan
16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)

21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

IX. PEMBANGUNAN WILAYAH

22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

23. Pembangunan Perdesaan

24. Reforma Agraria

25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)

26. Percepatan Pembangunan Papua

X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

27. Penguatan Pertahanan

28. Stabilitas Politik dan Keamanan

29. Kepastian Hukum

30. Reformasi Birokrasi

Disisi lain dalam Tema Pembangunan dalam Rancangan RKPD Propinsi Jawa Timur tahun 2018 adalah **"MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI JAWA TIMUR"**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

I. Pendidikan

1. Bosda SMK Mini
2. Peningkatan kemampuan vokasional dan profesional Lulusan SMK
3. *Community College*
4. Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

II. Kesehatan

5. Pengembangan Taman Posyandu
6. Pengendalian Penyakit Kusta
7. Pengendalian HIV dan AIDS
8. Pengendalian Penyakit TBC
9. Preventif promotif

III. Perumahan dan Permukiman

10. Penurunan Angka Backlog Perumahan
11. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
12. Penyediaan Air Bersih di Daerah Rawan Air
13. Peningkatan layanan pengelolaan sampah

IV. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

14. Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata
15. Pengembangan Kawasan Agro Industri
16. Pengembangan Industri dan Perdagangan
17. Promosi dan Misi dagang (dalam dan luar negeri)

18. Penguatan KPD dalam dan luar negeri
19. Perlindungan konsumen (*dashboard*)
20. Percepatan realisasi ijin investasi
- V. Ketahanan Energi
 21. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan
- VI. Ketahanan Pangan
 22. Efisiensi Mekanisme Pertanian
 23. Peningkatan Indeks Pertanaman
 24. Pembangunan Waduk/Embung/irigasi
- VII. Penanggulangan Kemiskinan (JALINMATRA)
 25. Aksesibilitas Kebutuhan Dasar Pendidikan dan Kesehatan
 26. Infrastruktur dasar: Sanitasi, Air bersih dan rumah tinggal
 27. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga, PFK, PK2, BRTSM
- VIII. Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman
 28. Pengembangan Pelabuhan di Wilayah Selatan Jawa Timur
 29. Pengembangan Pelabuhan Multipurpose
 30. Pengembangan Bandara
 31. Peningkatan kemantapan jalan
- IX. Pengembangan Wilayah
 32. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Daerah Tertinggal
 33. Peningkatan responsivitas dalam menangani Bencana pada Tanggap Darurat Bencana
- X. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan toleransi sosial
 34. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
 35. Peningkatan Toleransi Sosial

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019, maka dirumuskan visi pembangunan Kota Probolinggo sebagai berikut :

“ Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan ”

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 tersebut, maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut :

Misi Pertama : Membangun Masyarakat Kota Probolinggo Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing.

Misi ini adalah untuk menciptakan sosok masyarakat Kota Probolinggo tahun 2019 yang berkualitas dan berdaya saing, yakni masyarakat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas,

bermoral, memiliki spirit membangun dan siap untuk berkompetisi dan memiliki kesiapan untuk menghadapi era globalisasi bidang politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya (*Asean Community*).

Misi Kedua : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kompetitif, Kokoh dan Berkeadilan.

Misi ini adalah untuk menciptakan sosok perekonomian Kota Probolinggo tahun 2019 yang kokoh dan berkeadilan, yakni sosok perekonomian kota yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya, kokoh dan kuat dalam menghadapi berbagai turbulansi perekonomian namun tetap berorientasi pada perekonomian yang berkeadilan.

Misi Ketiga : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Patisipasi Publik

Misi ini adalah untuk menciptakan sosok Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun 2019, yakni sosok pemerintahan yang berkinerja tinggi, profesional, amanah dan bertanggungjawab dalam bingkai tatakelola pemerintahan yang baik guna melaksanakan fungsi pelayanan, pengaturan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, amanah dan demokratis.

Misi Keempat : Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan.

Misi ini untuk menciptakan sosok Kota Probolinggo Tahun 2019 yang telah terpenuhi infrastruktur kota yang mampu dan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Misi Kelima : Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Misi ini untuk menciptakan sosok kehidupan sosial kemasyarakatan Kota Probolinggo Tahun 2019 yang harmonis melalui peningkatan peran generasi muda, pembinaan olah raga, pengembangan seni dan budaya serta pengembangan rasa kesetiakawanan sosial terutama bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

4.1 Prioritas Pembangunan

Mempedomani tema rencana pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 - 2019, maka tema pembangunan Pemerintah Kota

Probolinggo tahun 2018 adalah: “ **Mencapai kemandirian masyarakat Kota Probolinggo dengan dukungan pemerintahan yang akuntabel dan demokratis**”.

Agar upaya pencapaian (*progress*) dari tema tersebut diatas dapat tercapai, maka ditetapkan prioritas dan sasaran pembangunan. Berdasarkan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 program kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih sampai dengan berakhirnya RPJMD 2014 – 2019 adalah :

1. Program Pembangunan Prasarana Lingkungan Permukiman;
2. Program Probolinggo Membara (Membangun Bersama Rakyat);
3. Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
4. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Pembangunan Keluarga)
5. Program Pemantapan Ketepatan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan;
6. Program Padat Karya untuk Penanggulangan Pengangguran;
7. Program Peningkatan Peran Kelembagaan (Revitalisasi) Posyandu;
8. Program Pembangunan Kota Jasa dan Investasi;
9. Program Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan;
10. Program Pemantapan Pelaksanaan 4 Pilar Kebangsaan.

Memperhatikan hal – hal tersebut diatas, maka prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2018 adalah :

1. Pendidikan;

- Peningkatan sarana prasarana pendidikan
- Pelayanan pendidikan murah dan terjangkau
- Peningkatan mutu pendidikan

2. Kesehatan

- Peningkatan Kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang kesehatan Tingkat pertama dan tingkat rujukan
- Pelibatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan (dari sisi kampanye, promosi, pencegahan penyakit /preventif dan promotif)

3. Kemiskinan dan Pengangguran;

- Peningkatan program jaminan sosial (Peningkatan pelayanan kesehatan)
- Penyediaan sarana pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan)
- Peningkatan pelayanan permukiman dan sanitasi
- Perluasan lapangan pekerjaan
- Pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi.
- Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- Peningkatan kompetensi angkatan kerja
- Peningkatan Ketahanan Pangan (Produksi pangan, infrastruktur, sarana dan prasarana)

4. Infrastruktur, tata ruang dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;

- Peningkatan Kualitas Jalan Kota
- Peningkatan Jalan Lingkungan

- Penanganan Kawasan Kumuh
 - Normalisasi Drainase Perkotaan
- 5. Reformasi Birokrasi, tata kelola, pelayanan publik dan partisipasi publik;**
- Peningkatan kualitas aparatur
 - Penguatan regulasi penyelenggaraan pemerintahan
- 6. Iklim Investasi Serta penguatan industri dan UMKM;**
- Penguatan regulasi perijinan dan penanaman modal
 - Peningkatan kualitas promosi investasi daerah
 - Peningkatan kualitas produk unggulan industri/UMKM
- 7. Lingkungan Hidup dan Pengurangan resiko bencana.**
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di sumbernya
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan
 - Pengendalian Pencemaran Udara, Air dan Tanah

4.2. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas, maka sasaran pembangunan tahun 2018 adalah :

1) Pendidikan

Sasaran, indikator kinerja, target kinerja Prioritas Pendidikan sebagaimana Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tabel berikut:

NO	Sasaran	Indikator	Capaian 2016	Target	
				2017	2018
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	(1) Angka rata-rata lama sekolah	9,71	9,42	9,57
		(2) Persentase angka melek huruf	95,04	97,13	97,83
		(3) Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ SMP/MTs Paket A, B dan C			
		- Usia 7 - 12	99,87	102,02	102,04
		- Usia 13- 15	95,44	99,02	99,04
		(4) Persentase akreditasi sekolah yang baik (unggul)	39,55	38,08	38,19
		(5) Persentase rasio guru sekolah (pemerataan)			
		- TK	11:1	17:1	16:1
		- SD/MI	15:1	24:1	23:1
		- SMP/MTs	13:1	29:1	28:1

2) Kesehatan

Sasaran, indikator kinerja, target kinerja Prioritas Kemiskinan dan pengangguran berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tabel berikut:

NO	Sasaran	Indikator	Capaian 2016	Target	
				2017	2018
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	(1) Angka usia harapan hidup	(Belum ada data resmi BPS)	70,80-71	70,80-71
		(2) Angka kematian bayi	26,64	24,74	23,87
		(3) Pravelansi balita gizi buruk	1	1,9	1,9
		(4) Angka kematian ibu	163,132	97,09	96,99
		(5) Angka kepesertaan KB	78	74	74
2	Meningkatnya keluarga sejahtera	(6) Persentase tingkat kesejahteraan keluarga:			
		- Keluarga pra sejahtera	2,23	2,60	2,55
		- Keluarga sejahtera I	12,08	12,30	12,25
		- Keluarga sejahtera II	36,39	36,10	36,20
		- Keluarga sejahtera III	32,08	33,60	33,65
		- Keluarga sejahtera III plus	17,22	15,68	15,70

3) Kemiskinan dan pengangguran

Sasaran, indikator kinerja, target kinerja Prioritas Kemiskinan dan pengangguran berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tabel berikut:

NO	Sasaran	Indikator	Capaian 2016	Target	
				2017	2018
1	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja	(1) Persentase tingkat pengangguran terbuka	21	15,8%	15,5%
		(2) Rasio pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia	81,7	82,4%	84,6%
2	Menurunnya	(3) Persentase	29,64	31,47%	30,28%

	jumlah penduduk miskin	penduduk miskin			
--	------------------------	-----------------	--	--	--

- 4) Infrastruktur, tata ruang dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman
 Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Prioritas Infrastruktur dan Tata Ruang berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tabel berikut:

NO	Sasaran	Indikator	Capaian 2016	Target	
				2016	2017
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kota dalam kondisi baik	(1) Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	82	85%	85%
		(2) Persentase fasilitas keselamatan jalan dengan kondisi baik	91,10	100%	100%
		(3) Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	77	80%	80%
		(4) Proporsi Fasilitas Umum Penunjang perekonomian dalam kondisi nyaman	77	80%	81%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	(5) Persentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW	95,67	86%	88%

- 5) Reformasi Birokrasi, tata kelola, pelayanan publik dan partisipasi publik
 Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Prioritas Reformasi Birokrasi, tata kelola dan pelayanan publik berdasarkan Indicator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tabel berikut:

NO	Sasaran	Indikator	Capaian 2016	Target	
				2017	2018

1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	(1) Persentase SKPD dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	79,3	85%	95%
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah	(Belum dilakukan penilaian)	WTP	WTP
		Skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	(Belum dilakukan penilaian)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	45	50%	80%
3	Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase maturitas SKPD	82,93	90%	95%

6) Iklim Investasi Serta penguatan industri dan UMKM

Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Prioritas Iklim Investasi, Industri dan UMKM berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tabel berikut :

NO	Sasaran	Indikator	Capaian 2016	Target	
				2017	2018
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	(1) Laju pertumbuhan ekonomi	(Belum ada data resmi BPS)	6,00%	7%
		(2) Tingkat inflasi	1,53	4%	4%
2	Meningkatnya investasi	(3) Realisasi investasi (juta Rp)	740M	662M	762M
		(4) Jumlah Investor	1.022	1.205	1.316
3	Meningkatnya Jumlah UMKM dan Koperasi yang sehat	(5) Persentase perkembangan jumlah UMKM	1,06%	2,0%	2,0%
		(6) Persentase jumlah	78,43	85%	87,5%

		koperasi aktif			
--	--	----------------	--	--	--

7) Lingkungan Hidup dan Pengurangan resiko bencana

Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tabel berikut :

NO	Sasaran	Indikator	Capaian 2016	Target	
				2017	2018
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	(1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,96	56,78	59,18

4.3. Program Pembangunan Daerah Tahun 2018

Program pembangunan daerah tahun 2018 beserta indikatornya yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2018 Kota Probolinggo adalah :

Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 5) Program Wawasan Wiyata Mandala
- 6) Program Pendidikan Masyarakat dan Inklusif

2. Urusan Kesehatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 7) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- 8) Program Kesehatan Olahraga dan Kesehatan Kerja
- 9) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Jiwa dan NAPZA
- 10) Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 11) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan
- 12) Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

13) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- gorong
- 3) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- 5) Program Pengembangan dan Pengeolaan Jaringan Irigrasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
- 6) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- 7) Program Pengawasan Jasa Kontruksi
- 8) Program Pengaturan Pembangunan Gedung dan Lingkungan
- 9) Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan
- 10) Program Pengawasan Bangunan Gedung dan Lingkungan
- 11) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Serta Pelayanan Publik
- 12) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum
- 13) Program Penyediaan dan Pengelolaan Limbah Domestik
- 14) Program Pemanfaatan Ruang
- 15) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 16) Program Pematusan / Drainase Jalan Kota
- 17) Program Pengelolaan dan Penatagunaan Sumberdaya Air

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program pengembangan perumahan dan kawasan permukimann
- 2) Program Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 2) Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 6) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- 7) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

6. Urusan Sosial

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 2) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 3) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
- 4) Program Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan
- 5) Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial

7. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Bencana)

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana
- 2) Program Tanggap Darurat Saat Bencana
- 3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Ketenagakerjaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 3) Program Jejaring Kerjasama Bidang Ketenagakerjaan
- 4) Program Pengembangan Hubungan Industrial

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan

3. Urusan Pangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

4. Urusan Pertanahan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- 2) Program Pengembangan System Informasi Pertanahan
- 3) Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan

5. Usulan Lingkungan Hidup

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 4) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
- 5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
- 6) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- 7) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau / RTH
- 8) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

- 9) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- 2) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 3) Program Penataan Administrasi Catatan Sipil
- 4) Program Pengelolaan Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 6) Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

7. Urusan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Keluarga Berencana
- 2) Program Pelayanan Kontrasepsi
- 3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri
- 4) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

8. Urusan Perhubungan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas LLAJ
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- 5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- 6) Program Perlengkapan Transportasi Elektrikal
- 7) Program Perhubungan Laut
- 8) Program Pengembangan Transportasi
- 9) Program Perlengkapan Transportasi Non Elektrikal

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

- 1) Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- 2) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Persandian
- 5) Program Penataan, Pengendalian Menara Telekomunikasi
- 6) Program Pengelolaan Data dan Infrastruktur Teknologi
- 7) Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi

- 8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Layanan e-government
- 9) Program Sosialisasi Ketentuan Dibiidang Cukai

10. Urusan Koperasi dan UMKM

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif
- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
- 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 5) Program Pengembangan dan Pengendalian Akses Permodalan Usaha Koperasi

11. Urusan Penanaman Modal Daerah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 2) Program Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan UMKM
- 3) Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Penanaman Modal
- 4) Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Dalam Rangka Peningkatan Investasi
- 5) Program Peningkatan Pelaksanaan Pendataan Informasi Pelaporan Bidang Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan
- 6) Program Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- 3) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

13. Urusan Statistik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

14. Urusan Kebudayaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya
- 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

15. Urusan Perpustakaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca
- 2) Program Pembinaan Perpustakaan
- 3) Program Peningkatan Pemasarakatan Perpustakaan

16. Urusan Kearsipan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
- 3) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
- 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan)
- 5) Program Pembinaan Kearsipan

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 2) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
- 5) Program Peningkatan Produksi Perikanan
- 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Pemberdayaan
- 7) Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir

2. Urusan Pariwisata

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Kemitraaan

3. Urusan Pertanian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
- 3) Program Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
- 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
- 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- 6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 7) Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- 8) Program Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Produk Pangan Asal Hewan Yang Diasuh Dan Produk Non Pangan Yang Berkualitas
- 9) Program Pemberdayaan Masyarakat Tani

4. Urusan Perdagangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

- 5) Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Pasar

5. Urusan Perindustrian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 2) Program Pengembangan Lingkungan Industri Sehat
- 3) Program Peningkatan Industri Kreatif
- 4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

URUSAN PENUNJANG

1. Urusan Perencanaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial dan Budaya

2. Urusan Keuangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- 2) Program Peningkatan dan Pengembanagan Aset Daerah
- 3) Program Peningkatan Perbendaharaan dan Kas Daerah
- 4) Program Peningkatan Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 5) Program Peningkatan Perencanaan Anggaran Daerah
- 6) Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
- 7) Program Peningkatan Penerimaan PBB dan BPHTB

3. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan, Penjenjangan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah

4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program Pengembangan Penelitian / Kajian Masyarakat

5. Sekretariat Daerah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- 3) Program Peningkatan Otonomi Kota
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga - Lembaga Sosial Keagamaan
- 5) Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama Dalam Kehidupan Bermasyarakat
- 6) Program Bina dan Fasilitasi Sarana Keagamaan Masyarakat
- 7) Program Perumusan Kebijakan Pendidikan Dan Pariwisata
- 8) Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Sosial
- 9) Program Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 10) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 11) Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan
- 12) Program Pengembangan Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat
- 13) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
- 14) Program Koordinasi dan Inventarisasi Potensi Sumberdaya Daerah
- 15) Program Pengembangan Fasilitasi Bina Usaha Daerah
- 16) Program Peningkatan Pengembangan Sarana Perekonomian
- 17) Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 18) Program Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- 19) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
- 20) Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
- 21) Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah
- 22) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- 23) Program Reformasi Birokrasi
- 24) Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
- 25) Program Pendokumentasian Kegiatan Kepala Daerah
- 26) Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan Kepala Daerah

6. Sekretariat Dewan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

7. Inspektorat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Good Governace Pemerintah Kota
- 2) Program Peingkatan Kapasitas Inspektorat Kota

8. Kecamatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kecamatan
- 2) Program Peningkatan Pelayanan di Kecamatan
- 3) Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
- 4) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat